

## PEMERINTAH DAERAH

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026

---

Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan, Sasaran Kinerja,  
Program Prioritas, dan Kerangka Pendanaan Daerah

**TAHUN ANGGARAN 2026**

Dokumen ini disusun sebagai contoh RKPD 2026 untuk kebutuhan publikasi/demonstrasi.  
Nama daerah, statistik, target, program, dan pagu dapat disesuaikan dengan data resmi pemerintah daerah.

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan arah pembangunan daerah untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahun 2026.

RKPD 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat kualitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mempercepat pemerataan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital.

Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta perpaduan proses atas-bawah dan bawah-atas. Aspirasi masyarakat, evaluasi capaian tahun sebelumnya, prioritas nasional dan provinsi, serta kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan dalam penetapan sasaran dan program prioritas.

### Catatan Penggunaan

Dokumen ini menggunakan data dan target indikatif agar dapat langsung dipakai sebagai bahan demo pada website Tema Pemda. Untuk penggunaan resmi, seluruh angka, nomenklatur program, dasar hukum daerah, nama kepala daerah, dan pagu harus disesuaikan dengan dokumen resmi pemerintah daerah terkait.

## DAFTAR ISI

| Bagian   | Uraian                                                       | Hal. |
|----------|--------------------------------------------------------------|------|
| BAB I    | Pendahuluan                                                  | 3    |
| BAB II   | Gambaran Umum Kondisi Daerah                                 | 4    |
| BAB III  | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Permasalahan Pembangunan | 5    |
| BAB IV   | Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah                         | 6    |
| BAB V    | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026                 | 7    |
| BAB VI   | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas                       | 9    |
| BAB VII  | Kerangka Pendanaan dan Indikator Kinerja                     | 11   |
| BAB VIII | Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi                       | 12   |
| BAB IX   | Penutup                                                      | 13   |

# BAB I - PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan atas rencana pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi instrumen utama untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tahun 2026 diarahkan sebagai tahun penguatan layanan dasar sekaligus percepatan transformasi ekonomi dan digital pemerintah daerah.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

- Memberikan arah pembangunan daerah dan prioritas pembangunan tahun 2026.
- Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
- Menjaga konsistensi antara sasaran pembangunan, program prioritas, indikator kinerja, dan kemampuan pendanaan.
- Menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Mendorong transparansi serta partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah.

## 1.3 Landasan Hukum Utama

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah beserta pemutakhirannya.

## 1.4 Sistematika RKPD

RKPD disusun dalam sembilan bab yang mencakup pendahuluan, kondisi daerah, evaluasi pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan, prioritas dan sasaran, program prioritas, kerangka pendanaan dan indikator, mekanisme pengendalian, serta penutup.

## BAB II - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Profil Singkat Daerah

Daerah memiliki karakter wilayah yang memadukan kawasan perkotaan, perdesaan, pusat pelayanan pemerintahan, sentra pertanian, perdagangan, jasa, serta kawasan pengembangan ekonomi. Konektivitas antarkawasan dan akses terhadap pelayanan dasar menjadi fokus penting untuk memastikan pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan.

### 2.2 Indikator Makro Daerah

| No | Indikator                    | Satuan | 2024 | 2025* | Target 2026 |
|----|------------------------------|--------|------|-------|-------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | %      | 4,8  | 5,1   | 5,3         |
| 2  | Tingkat Pengangguran Terbuka | %      | 5,4  | 5,1   | 4,8         |
| 3  | Persentase Penduduk Miskin   | %      | 8,9  | 8,4   | 7,9         |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia   | poin   | 73,4 | 74,0  | 74,7        |
| 5  | Gini Ratio                   | indeks | 0,36 | 0,35  | 0,34        |
| 6  | Indeks Kepuasan Masyarakat   | poin   | 85,0 | 86,0  | 87,5        |

\*Angka 2025 dan target 2026 bersifat indikatif untuk contoh dokumen.

### 2.3 Kondisi Pelayanan Dasar

| Bidang        | Kondisi Umum                                                                             | Arah Perbaikan 2026                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pendidikan    | Akses relatif baik, namun kualitas antarwilayah belum merata.                            | Penguatan mutu sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan pemerataan sarana.      |
| Kesehatan     | Layanan dasar tersedia, tetapi waktu tempuh dan kapasitas layanan masih bervariasi.      | Penguatan puskesmas, layanan ibu-anak, gizi, dan kesehatan preventif.          |
| Infrastruktur | Jaringan jalan utama membaik; jalan lingkungan dan drainase masih memerlukan penanganan. | Rehabilitasi jalan, jembatan, drainase, air minum, sanitasi, dan konektivitas. |
| Sosial        | Kelompok rentan membutuhkan integrasi data dan layanan yang lebih tepat sasaran.         | Pemutakhiran data, perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan keluarga.         |
| Digital       | Layanan digital berkembang namun belum sepenuhnya terintegrasi.                          | Satu data, interoperabilitas, layanan publik digital, dan keamanan informasi.  |

## BAB III - EVALUASI PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

### 3.1 Ringkasan Evaluasi Capaian

Evaluasi pelaksanaan pembangunan menunjukkan kemajuan pada akses layanan dasar, peningkatan konektivitas, digitalisasi layanan, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, beberapa indikator masih memerlukan percepatan, terutama pemerataan kualitas infrastruktur, penurunan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan efektivitas layanan lintas perangkat daerah.

| Sasaran 2025                       | Capaian Indikatif | Status           | Tindak Lanjut 2026                                          |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas layanan dasar | 82%               | On Track         | Fokus mutu layanan dan wilayah tertinggal.                  |
| Pemerataan infrastruktur           | 76%               | Perlu Percepatan | Prioritaskan ruas strategis dan akses layanan dasar.        |
| Pertumbuhan ekonomi inklusif       | 80%               | On Track         | Perkuat UMKM, investasi dan ekonomi berbasis potensi lokal. |
| Penurunan kemiskinan               | 72%               | Perlu Percepatan | Integrasi perlindungan sosial dan pemberdayaan produktif.   |
| Transformasi digital pemerintah    | 84%               | On Track         | Integrasi data dan simplifikasi layanan digital.            |

### 3.2 Permasalahan Utama Pembangunan

- Kualitas layanan dasar belum merata antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.
- Konektivitas jalan, jembatan, drainase, air minum, dan sanitasi masih membutuhkan peningkatan.
- Produktivitas ekonomi lokal dan kapasitas UMKM belum optimal.
- Pengangguran usia muda dan kesenjangan keterampilan masih menjadi tantangan.
- Integrasi data pembangunan, data kemiskinan, dan data pelayanan publik belum sepenuhnya terpadu.
- Ketahanan terhadap bencana, perubahan iklim, dan risiko lingkungan perlu diperkuat.
- Efisiensi belanja serta pengukuran manfaat program perlu ditingkatkan.

### 3.3 Isu Strategis 2026

#### Isu Strategis

Pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar; penguatan kualitas SDM; penciptaan lapangan kerja; pengembangan ekonomi lokal; ketahanan pangan dan lingkungan; transformasi digital; serta reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.

## BAB IV - KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 4.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 diarahkan pada penguatan daya beli masyarakat, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pengembangan UMKM, perluasan investasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas dan efisiensi ekonomi.

### 4.2 Asumsi Makro dan Sasaran

| Indikator            | Target 2026 | Arah Kebijakan                                                        |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pertumbuhan ekonomi  | 5,3%        | Investasi produktif, UMKM, pertanian modern, perdagangan dan jasa.    |
| Inflasi daerah       | 2,5% - 3,5% | Pengendalian harga, distribusi pangan, dan koordinasi TPID.           |
| Pengangguran terbuka | 4,8%        | Pelatihan berbasis kebutuhan industri dan perluasan kesempatan kerja. |
| Kemiskinan           | 7,9%        | Perlindungan sosial tepat sasaran dan pemberdayaan ekonomi keluarga.  |
| IPM                  | 74,7        | Pendidikan, kesehatan, gizi, dan peningkatan pendapatan.              |

### 4.3 Kerangka Pendapatan dan Belanja

| Komponen                 | Indikasi 2026   | Proporsi |
|--------------------------|-----------------|----------|
| Pendapatan Asli Daerah   | Rp 620 miliar   | 22%      |
| Pendapatan Transfer      | Rp 1,95 triliun | 70%      |
| Lain-lain Pendapatan Sah | Rp 220 miliar   | 8%       |
| Total Pendapatan         | Rp 2,79 triliun | 100%     |

Belanja daerah diarahkan dengan prinsip money follows program, mengutamakan pelayanan dasar, pemenuhan standar pelayanan minimal, program prioritas kepala daerah, kewajiban belanja yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, serta pengendalian belanja yang kurang produktif.

## BAB V - PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

### 5.1 Tema Pembangunan 2026

#### Tema RKPD 2026

“Mempercepat Pemerataan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Berkualitas, dan Tata Kelola Digital.”

### 5.2 Prioritas Pembangunan Daerah

| No | Prioritas                                      | Fokus Utama                                                                                     |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas      | Jalan, jembatan, drainase, air minum, sanitasi, transportasi, dan konektivitas antarwilayah.    |
| 2  | Peningkatan Kualitas Pendidikan                | Mutu sekolah, kompetensi guru, sarana belajar, literasi digital, dan akses pendidikan.          |
| 3  | Penguatan Layanan Kesehatan dan Gizi           | Layanan primer, kesehatan ibu-anak, stunting, penyakit menular dan tidak menular.               |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM                   | Pemberdayaan UMKM, investasi, pasar, pertanian, perikanan, industri kecil, dan ekonomi kreatif. |
| 5  | Perlindungan Sosial dan Pengurangan Kemiskinan | Data terpadu, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan keluarga rentan, dan inklusi sosial.          |
| 6  | Ketahanan Pangan dan Lingkungan                | Produksi pangan, irigasi, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, mitigasi bencana.            |
| 7  | Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi   | Satu data, layanan publik digital, SPBE, akuntabilitas, dan penyederhanaan proses.              |

### 5.3 Sasaran Pembangunan 2026

| Sasaran                                | Indikator                    | Target 2026 |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Meningkatnya kualitas SDM              | IPM                          | 74,7        |
| Menurunnya kemiskinan                  | Penduduk miskin              | 7,9%        |
| Meningkatnya kesempatan kerja          | TPT                          | 4,8%        |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur    | Indeks kondisi infrastruktur | 82 poin     |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | IKM                          | 87,5 poin   |
| Meningkatnya tata kelola digital       | Indeks SPBE                  | 3,65        |

## BAB VI - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

### 6.1 Program Prioritas Lintas Perangkat Daerah

| Program                          | Penanggung Jawab     | Kegiatan Utama                                                         | Pagu Indikatif |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Infrastruktur Jalan dan Jembatan | PUPR                 | Rehabilitasi jalan strategis; pemeliharaan berkala; jembatan; drainase | Rp 420 M       |
| Air Minum dan Sanitasi           | PUPR/Perkim          | Perluasan jaringan air minum; sanitasi; kawasan kumuh                  | Rp 185 M       |
| Sekolah Berkualitas              | Pendidikan           | Rehab ruang kelas; digitalisasi; peningkatan kompetensi guru           | Rp 210 M       |
| Layanan Kesehatan Primer         | Kesehatan            | Penguatan puskesmas; alat kesehatan; layanan ibu-anak; gizi            | Rp 235 M       |
| UMKM Naik Kelas                  | Koperasi/Perdagangan | Pendampingan usaha; digitalisasi; kemitraan; promosi                   | Rp 72 M        |
| Ketahanan Pangan                 | Pertanian/Pangan     | Benih; irigasi tersier; alsintan; cadangan pangan                      | Rp 98 M        |
| Perlindungan Sosial Terpadu      | Sosial               | Pemutakhiran data; bantuan; pemberdayaan keluarga                      | Rp 88 M        |
| Digital Government               | Kominfo/Bappeda      | Integrasi layanan; satu data; keamanan informasi; dashboard kinerja    | Rp 56 M        |

### 6.2 Program Unggulan 2026

- 100 Km Jalan Mantap: rehabilitasi dan pemeliharaan ruas prioritas penghubung pusat produksi dan layanan publik.
- Satu Desa/Satu Kelurahan Satu Layanan Cepat: peningkatan akses layanan administrasi dan pengaduan berbasis digital.
- Sekolah Aman dan Digital: perbaikan sarana dasar, konektivitas internet, dan pembelajaran digital.
- Puskesmas Responsif: penguatan layanan primer, antrean digital, layanan ibu-anak, dan skrining kesehatan.
- UMKM Go Digital: katalog produk lokal, pembayaran digital, pelatihan pemasaran, dan akses pembiayaan.
- Data Daerah Terpadu: integrasi data pembangunan, kemiskinan, bantuan sosial, aset, dan kinerja perangkat daerah.

### 6.3 Prinsip Penentuan Lokasi Prioritas

Lokasi prioritas ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat, kesenjangan layanan, jumlah penerima manfaat, kondisi infrastruktur, keterhubungan dengan pusat ekonomi, tingkat kemiskinan, risiko bencana, kesiapan lahan, serta kemampuan pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026.

## BAB VII - KERANGKA PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA

### 7.1 Arah Alokasi Belanja Prioritas

| Kelompok Belanja Prioritas         | Pagu Indikatif | Persentase |
|------------------------------------|----------------|------------|
| Pendidikan                         | Rp 650 M       | 23%        |
| Kesehatan                          | Rp 420 M       | 15%        |
| Infrastruktur dan Perumahan        | Rp 720 M       | 26%        |
| Ekonomi, UMKM dan Ketahanan Pangan | Rp 310 M       | 11%        |
| Perlindungan Sosial                | Rp 180 M       | 6%         |
| Digitalisasi dan Tata Kelola       | Rp 140 M       | 5%         |
| Urusan Penunjang dan Lainnya       | Rp 370 M       | 14%        |

### 7.2 Indikator Kinerja Utama RKPD

| No | Indikator                       | Baseline 2025* | Target 2026 | Sumber Data          |
|----|---------------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 1  | Persentase jalan kondisi mantap | 78%            | 82%         | Dinas PUPR           |
| 2  | Akses air minum layak           | 91%            | 93%         | PUPR/Perkim          |
| 3  | Akses sanitasi layak            | 86%            | 89%         | PUPR/Perkim          |
| 4  | Rata-rata lama sekolah          | 8,9 th         | 9,1 th      | BPS/Dinas Pendidikan |
| 5  | Prevalensi stunting             | 18%            | 15%         | Dinas Kesehatan      |
| 6  | UMKM terdigitalisasi            | 42%            | 55%         | Dinas Koperasi       |
| 7  | Indeks SPBE                     | 3,40           | 3,65        | Kominfo              |
| 8  | Indeks Kepuasan Masyarakat      | 86,0           | 87,5        | Bagian Organisasi    |

\*Baseline 2025 bersifat indikatif untuk contoh dokumen.

### 7.3 Sumber Pendanaan

- APBD Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai kewenangan.
- Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.
- Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.
- Dana Desa untuk kewenangan dan prioritas desa.
- Kerja sama pemerintah dan badan usaha sesuai ketentuan.
- Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL) dan sumber sah lainnya.

## BAB VIII - PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### 8.1 Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan RKPD dilakukan melalui APBD dan rencana kerja perangkat daerah. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai sasaran, indikator, lokasi, jadwal, dan pagu yang telah ditetapkan. Program lintas sektor dikoordinasikan melalui forum tematik dan rapat pengendalian berkala.

### 8.2 Pengendalian

- Pengendalian bulanan terhadap realisasi fisik dan keuangan kegiatan strategis.
- Evaluasi triwulanan terhadap capaian indikator kinerja dan manfaat program.
- Pemantauan lapangan pada paket infrastruktur dan pelayanan dasar prioritas.
- Penggunaan dashboard kinerja untuk mendeteksi keterlambatan dan deviasi.
- Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat, dan evaluasi internal.

### 8.3 Evaluasi dan Pelaporan

| Periode     | Fokus Evaluasi                | Output                                                     |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bulanan     | Realisasi fisik dan keuangan  | Laporan progres perangkat daerah                           |
| Triwulanan  | Capaian indikator dan kendala | Rapat pengendalian dan rencana tindak lanjut               |
| Semester    | Efektivitas program prioritas | Evaluasi semester RKPD                                     |
| Akhir Tahun | Capaian sasaran daerah        | Laporan evaluasi RKPD dan bahan penyusunan RKPD berikutnya |

### 8.4 Transparansi dan Partisipasi Publik

Informasi prioritas, program strategis, progres kegiatan, dan indikator utama dipublikasikan melalui portal resmi pemerintah daerah. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, usulan, dan umpan balik melalui kanal layanan publik yang terintegrasi.

## BAB IX - PENUTUP

RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan selama satu tahun. Keberhasilan RKPD sangat ditentukan oleh konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, kualitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, koordinasi lintas perangkat daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.

Prioritas tahun 2026 menekankan pemerataan layanan dasar dan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan lingkungan, serta transformasi digital pemerintahan. Seluruh program diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

### Komitmen Pelaksanaan

Setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti arah kebijakan dan sasaran RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah, menjaga kesesuaian indikator, lokasi, target penerima manfaat, serta memastikan kualitas belanja dan akuntabilitas pelaksanaan.

Ditetapkan di: \_\_\_\_\_  
Tanggal: \_\_\_\_\_

**KEPALA DAERAH,**

\_\_\_\_\_  
**Nama Kepala Daerah**

## LAMPIRAN - MATRIKS RINGKAS PRIORITAS RKPD 2026

| Prioritas     | Indikator Hasil     | Target        | Perangkat Daerah Utama             | Pendanaan      |
|---------------|---------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| Infrastruktur | Jalan mantap        | 82%           | PUPR                               | APBD/Transfer  |
| Pendidikan    | IPM/RLS             | 74,7 / 9,1 th | Pendidikan                         | APBD/DAK       |
| Kesehatan     | Stunting            | 15%           | Kesehatan                          | APBD/DAK       |
| Ekonomi       | Pertumbuhan ekonomi | 5,3%          | Perdagangan/<br>Koperasi/Pertanian | APBD/Kemitraan |
| Sosial        | Kemiskinan          | 7,9%          | Sosial/Bappeda                     | APBD/Transfer  |
| Lingkungan    | Pengelolaan sampah  | 78%           | DLH                                | APBD/Kemitraan |
| Digital       | Indeks SPBE         | 3,65          | Kominfo/Bappeda                    | APBD           |

Dokumen lampiran dapat diperluas menjadi matriks program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, perangkat daerah penanggung jawab, dan pagu indikatif sesuai kebutuhan pemerintah daerah.